

**PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2008
(SUATU TINJAUAN HISTORIS)**

Di Susun Oleh

**Imam Gozali
Marwoto Saiman
Kamarudin**

Pendidikan Sejarah, FKIP – Universitas Riau
Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru

Abstrak

Meranti Islands Regency established by Law No. 12 Year 2009 and officially became Kabupaten on May 26, 2009. The formation of Meranti Islands Regency known as the formation of Ex Kewedanaan Selat Panjang covering Bantar, Belitung, Tanjung Samak. Actually the long history of Meranti island regency's division was started since 1957. The objective of this study was to determine the developmental formation Meranti Islands Regency, before becoming regency until forming as a Meranti Islands Regency (2008). This study includes changes in the conditions of living, socio-cultural, economic, political and educational communities of Meranti Islands Regency.

This study used a comparative study, as an effort to collect, actualize, and interpret the data and study it more clearly from some factors related with the condition, situation, and the phenomena which provided.

The results of this study showed that the development of Meranti island regency, before becoming regency had reveal progress, in the field of socio-cultural, economic, political, and education but not evenly. Therefore the Meranti Islands Regency wanted to set the region (autonomy). After the meranti islands regency became regency, local government gave more attention in the development of facilities and infrastructure in their respective fields, as well as the Meranti Islands Regency's social life.

Keywords: *Formation Meranti Islands Regency, The history of meranti.*

PENDAHULUAN

Status suatu daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam percepatan pembangunan. Makin banyak jumlah kecamatan atau desa, makin membuka kesempatan suatu daerah tersebut terbuka dari isolasi. Melihat kenyataan tersebut, tidak heran bila suatu daerah harus selalu memikirkan pemekaran wilayahnya.

Kabupaten Meranti terbentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2009, dan resmi menjadi kabupaten pada tanggal 26 Mei 2009, hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Merbau, Rangsang, Rangsang Barat, Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat. Hal ini merupakan salah satu syarat untuk pemekaran suatu kabupaten.

Dengan adanya pemekaran wilayah rentang kendali bagi masyarakat menjadi lebih pendek. Paling tidak, ada dua keuntungan yang diperoleh dari pemekaran ini. *Pertama*, masyarakat akan lebih cepat berurusan, dan *kedua*, biaya transportasi untuk berurusan pun berkurang. Jika sebelumnya suatu wilayah harus mengurus lingkup yang begitu luas, sekarang lingkup tersebut sudah berkurang. Dengan demikian jumlah penduduk yang diurus juga berkurang, Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam melayani masyarakat. Disamping itu dana pembangunan daerah akan semakin menyebar. Jika tadinya daerah memikirkan wilayah yang luas, dengan dipersempitkan wilayah, maka jatah pembangunan secara otomatis akan bertambah. Sejarah pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlepas dari peranan Pemprop riau. Yang diteruskan ke kabupaten kemudian dilanjutkan oleh masyarakat Eks Kewedanan Kepulauan Meranti.

Aspirasi masyarakat ini dimulai dengan pembentukan Panitia Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti pada 17 Juni 1999 yang bertugas melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Eks Kewedanan Tebing Tinggi, yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 Juli 1999. Hasil mubes ini memutuskan pembentukan Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (KPPKMKM) Komite ini bertugas menkoordinir langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mencermati proses dan rentang waktu tersebut diatas, menunjukkan bahwa perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan momentum sejarah yang perlu dikaji dan didokumentasikan sebagai bukti sejarah yang akan dikenang generasi mendatang. Oleh sebab itu penulis menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan lebih lanjut lagi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis membeberkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum pemerintahan Kepulauan Meranti sebagai bagian dari Kabupaten Bengkalis.
2. Siapa saja pelopor Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Apakah usaha- usaha rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perjuangan membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Apa latar belakang perjuangan rakyat Kepulauan Meranti ingin Membentuk.

Agar penulisan ini tidak terlalu luas ruang lingkupnya serta keterbatasan waktu, pikiran dan biaya maka penulis perlu membatasi masalah-masalah Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam penelitian ini, maka diperlukan perumusan masalah. Apa bila telah diperoleh informasi yang cukup dari studi pendahuluan atau studi eksplorasi maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka penulis harus merumuskan masalah sehingga jelas dari mana harus dimulai (**Suharsini Arikanto, 1988 : 36**).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Bagaimanakah perjuangan rakyat Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Meranti.

Sehubungan dengan itu tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang perjuangan Rakyat kepulauan Meranti serta faktor pendukung dan kendala – kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk menjelaskan keadaan Kepulauan Meranti tahap demi tahap, dimulai dari masa Kepulauan Meranti, ketika menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis dan sebagai sebuah kabupaten yang berdiri sendiri
3. Untuk mengetahui usaha – usaha yang dilakukan dalam mewujudkan Kepulauan Meranti sebagai Kabupaten.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegunaan peneliti yang dapat diambil, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang sejarah lokal yang dapat memperkaya sejarah nasional.
2. Memberikan pengetahuan kepada para generasi muda tentang semangat perjuangan rakyat dalam membangun daerahnya.
3. Sebagai bahan masukan bagi pembaca tentang usaha yang dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Memberikan informasi kepada masyarakat keberadaan Kabupaten Kepulauan Meranti serta potensi daerahnya.

Untuk tidak salah penafsiran tentang istilah-istilah yang ada dalam judul "Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti" Maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut sebagai berikut :

1. Pembentukan yaitu suatu kajian rancangan mewujudkan suatu perubahan menjadi sesuatu (**Kamus Besar Indonesia**)
2. Kabupaten Suatu Wilayah yang statusnya dalam pemerintahan Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Bupati
3. Kepulauan Adalah suatu kawasan ataupun suatu Pulau yang terpisah oleh dikelilingi air (**Kamus Besar Indonesia**)
4. Meranti Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi
5. 2008 Tahun Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Tinjauan Historis Dalam Penelitian Sejarah.

METODE PENELITIAN

Metode Merupakan salah satu kerja untuk memahami sub Objek Penelitian yang sistematis dan intensif dari pelaksanaan penelitian ilmiah, Guna memperoleh Kebenaran yang Optimal. Yang dimaksud dengan metode adalah patokan dalam meneliti dan menceritakan kisah sejarah yang akan memberikan batas dan sasaran yang jelas dalam usaha yang melukiskan hari atau masalampau .

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode komperatif sebagai mana dikatakan oleh Winarno Surachman bahwa: Metode Komferatif yaitu : usaha untuk mengumpulkan, mengustuasul dan menginterprestasikan data tersebut dan menelaahnya secara jelas lagi dari faktor faktor tertentu yang berhubungan dengan kondisi, stuasi dan fenomena- fenomena yang disediakan (Winarno Surachmad, 1980)

Winarno Surachman dalam bukunya pengantar ilmu Dasar Metode Teknik, menyatakan sebuah Metode dapat disebut historis atau dokumenter bila penyelidikan ditinjauakan penguraiyan dan penjelasan upaya yang telah lalu melalui dokumen. Pada umumnya Metode historis berlangsung mengikuti pola sebagai berikut: pengumuman data, penilayan, data Penapsiran data Penyusunan data.

Metode Sejarah adalah sekumpulan perinsip atau aturan yang memberi bantuan secara efektif dalam mengumpulkan data atau bahan -bahan bagi Sejarah, menilai secara keritis dan kemudian menyajikan sentesa dan hasil-hasil dalam bentuk tertulis.

Dalam hal ini diperlukan proses mencari menemukan Sumber, diuji dan dinilai secara keritik Intren, data dan fakta dirankai di interperestasikan dan dituangkan dalam penulisan Sejarah (Nugroho Noto Susanto, 1984:11)

Dengan demikian, kegunaan Metode Sejarah untuk mengumpulkan bahan bercorak Sejarah, kemudian dinilai secara kritis sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk tulisan ilmiah. Hal ini jelas pula dengan tujuan Metode Sejarah yaitu membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, menilai, mengevaluasi fakta dan membandingkan bukti-bukti, menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Cara-cara awal dalam penulisan Metode Sejarah adalah:

1. Pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu
2. Pengumpulan bahan-bahan secara tertulis dan lisan yang relevan
3. Menyinkronkan bahan-bahan yang tidak otentik
4. Menyimpan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik
5. Menyusun kesaksian yang dapat dipercaya yaitu menjadi suatu kisah atau penyaji yang berarti.

Selain Metode Sejarah (historis) dan dokumen penulis dengan menggunakan metode deskriptif, Metode ini sebagai pelengkap dalam memperoleh data, Muhammad Nazir dalam bukunya Metode Penelitian halaman 64, menyatakan secara harfiah Metode deskriptif adalah Metodologi Penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian sehingga Metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar berlakunya tetapi dalam Metode Penelitian yang lebih luas, diluar Metode Penelitian yang lebih luas, diluar Metode Sejarah dan eksperimental serta lebih Umum sering diberi nama Metode Survei.

Tempat penelitian berkisar antara Kabupaten Kepulauan Meranti, Kotamadya Pekanbaru, Dinas/Instansi terkait, Perpustakaan baik yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, maupun di Pekanbaru yang dapat membantu dalam perolehan data.

Waktu penelitian dimulai dengan pembuatan proposal sampai pada penyelesaian akhir skripsi sehingga layak untuk diuji.

Dalam suatu penelitian data yang dikemukakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji kebenarannya. Untuk mengambil data dilakukan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan dilakukan teknik : dilakukan dengan mewawancarai para tokoh – tokoh yang terlibat dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, maupun masyarakat setempat. Adapun tokoh-tokoh yang diwawancarai yang terlibat langsung dengan proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti ini, antara lain :

1. Bapak DR. Ir. Agusnimar MSc selaku anggota pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bapak. Drs Fauzan Sarahman SSi selaku sekretaris badan perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Bapak Herry. SE Selaku Anggota Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengumpulkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, piagam, surat keputusan dan bukti-bukti lainnya yang mendukung, antara lain :

1. Surat Keputusan Pemilihan panitia Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.(Terlampir).
2. Surat dukung pemerintah dan DPRD Tk. II Bengkalis dan Tk. I Riau (Terlampir).
3. Undang-undang No 12 Tahun 2009. Tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Terlampir).

Mengumpulkan bahan-bahan serta melengkapi data-data yang dianggap perlu dengan mengutip teori-teori yang digunakan sebagai titik tolak pemikiran dalam penelitian ini.

Langka-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah :

Mewawancarai paratakoh Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Masyarakat setempat dan mengumpulkan bahan-bahan yang dianggap perlu.serta melengkapidata-data yang dianggap perlu dan mengutip tiori-tiori yang digunakan sebagai titiktolak pemikiran Penelitian ini serta membandingkan dan mengolah literature yang berhubungan dengan penelitian. .

Mendeskripsikan data yang diperoleh, dengan demikian diharapkan penelitian ini tidak sekedar menghasilkan sejarah merekonstruksikan ”apa yang terjadi”, menseleksi kejadian-kejadian penting dan diatur menurut proses waktu sehingga tersusun sebagai cerita. Tetapi yang ingin dihasilkan ialah sejarah non-naratif, yang tidak hanya menyusun cerita tetapi berpusat pada masalah atau problem oriented (Sartono Kartodirjo, 1982: 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten kepulan meranti merupakan pemekaran darai kabupaten bengkalis yang terdapat di profinsi Riau , dahulu kabupaten meranti merupakan kecamatan yang berada di kabupaten bengkalis dan kemudian dikhawatirkan akan berubah lagi menjadi Desa, sehinga dibiarkan terus bukanlah merupakan suatu hal mustahil bila akhirnya, daerah Tebing Tinggi ini akan hilang. Pemekaran suatu daerah terutama untuk Kabuipaten baru merupakan salah satu solusi untuk mempercepat peroses pembangunan nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepentingan sosial, politik dan ekonomi dapat memicu ketidak puasan daerah terutama daerah yang mempunyai pendapat surplus kepada pemerintah pusat. Jika hal ini tidak diatasi lambat laun dapat mngancam desintegrasi nasional (Aceh, Riau, Kaltim dan irian

Jaya) oleh sebab itu pemekaran daerah merupakan salah satu yang dapat memelihara integrasi nasional dan menjaga keutuhan Negara republik Indonesia.

Berangkat dari pemikiran diatas, di tambah lagi dengan tidak adanya perkembangan yang cukup berarti daerah yang eks kewedanaan Tebing Tinggi selama berada dibawah pemerintahan kabupaten bengkalis, dan dapat di katakan sangat tertinggal dengan daerah lainnya baik dari segi fasilitas dan kurang efektif dilaksanakannya pembangunan karena adanya rentang kendali tersebut, yang kemudain menyebarkan target yang hendak tercapai tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga timbullah inisiatif dan tekad perjuangan dari tokoh-tokoh masyarakat dari Tebing Tinggi untuk mencari solusi yang tepat bagaimana eks kewedanaan ini bias menjadi daerah Kabupaten yang kemudian terbuka kesempatan pada para tokoh untuk pembntukan Kabupaten.

Pada saat masyarakat ingin melanjutkan usaha untuk meningkatkan daerah tebing tinggi menjadi daerah tingkat II, keluar pula suatu ketetapan pemerintah yang di tuangkan dalam sebuah Pempres No 22 Tahun 1993 Tentang Liquidasi daerah-daerah keresidenan dan kewedanaan di seluruh Indonesia. (**Pengkajian Pemekaran Kabupaten Bengkalis Dan Kabupaten Kepulauan Meranti**).

Setelah Orde Baru di tumbangkan oleh Era Revormasi, upaya untuk meningkatkan status tebing tinggi dari kecamatan menjadi kabupaten semakin menampakan hasil. Suatu penantian dari perjanjian selama 81 tahun yang semenjak 1957 keinginan masyarakat bekas kewedanaan tebing tinggi, untuk menjadikan tebing tinggi sebagai suatu wilayah kabupaten daerah tingkat II.

Adapun perjuangan ini dimulai dari:

- Rintasan Pemekaran Kabupaten Kota oleh Pemerintahan Propinsi Riau
- Kebijakan Pemerintah Bengkalis
- Perjuangan masyarakat Tebing Tinggi.

Pada tahun 1963 dalam rapat akbar 19 desember 1963 dengan pimpinan rapat adalah Muktar Zainal (alm), Jauhari Dagang dan saudara A. Wahid Hs (Alm) As pada 1 januari 1964 berhasil dicapai kesepakatan dankemudian memutus delegasi. Yaitu Mas Selamat dan Awahid yaitu pada bulan april 1964 kepada daerah Tk II Benkalis, Wakil ketua DPRD GR TK II Bengkalis, pimpinan F.N.cabang Bengkalis, Gubernur/KDH TK I. Riau. Wakil ketua DPRD TK.I Riau, dan pimpinan F.N Riau. Melihat keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mendirikan Daerah TK II MAKA DPRD-GR TK I Riau mengirimkan tim kusus ke Selatpanjang. Sehingga terjadilah pertemuan dengan masyarakat dengan Selatpanjang pada tanggal 19 desember 1964 dan pembentukan kabupaten hampir menjadi kenyataan. Tetapi karena pergolakan politik nasional waktu itu (30/SPKI) dan pergantian kepemimpinan nasional, pembentukan kabupaten menjadi tertunda.

April 1999 selesai reformasi dan era pemekaran kabupaten

Di Propinsi Riau, di bentuk panitia persiapan pembentukan Kabupaten eks kewedanaan Selatpanjang di Pekanbaru yang di ketuai oleh H.Ahmad Bebas dan sekaligus dideklarasikan persiapan kabupaten TK II dan mengadakan seminar yang di lanjutkan dengan mengadakan Musyawarah Besar Masyarakat Eks kewedanaan pada tanggal 15-16 juni 1999 di selatpanjang. Sekali lagi keinginan tersebut belum menjadi kenyataan. Eks kewedanaan Tebing tinggi tinggal satu-satunya Eks kewedanaan di Riau yang belum di mekarkan menjadi kabupaten.dan pada tahun 2005 kembali diperjuangkan Kabupaten Kepulauan Meranti diperjuangkan oleh Badan perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.beberapa segenap mssyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.Beberapa pertemuan telah dilakukan, baik di selatpanjang dengan segenap masyarakat Meranti maupun di Pekanbaru.

Pada tanggal 12 september 2005 terjadi kesepakatan dimana generasi perjuangan memasuki gelombang ketiga yang tentu saja melanjutkan orang tua mereka. Maka di bentuklah badan perjuangan pembentukan kabupaten kepulauan meranti (BP2KM) yang di tunjuk sebagai ketua Prof Dr Yohanes Oemar, MM dan Falzan surahman ,SSi selaku sekretaris BP2KM.

Pembentukan BP2KM mendapat respon luas masyarakat. Dan akhirnya di bentuk BP2KM cabang yang merupakan perpanjangan tangan BP2KM di pekanbaru cabang ini terdapat lima kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu di bentuk meranti center Jakarta (MCJ) untuk memantau perkembangan perjuangan di Jakarta, baik di Gedung MPR atau DPR maupun Depdagri. Pada tanggal 2 januari 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan amanat Presiden (Ampres).

3. 3. Untuk mengetahui faktor Pendukung dan kendala dalam Perjuangan

a. Faktor Pendukung

1. Aspek sumber daya Alam baik dari sektor migas maupun non migas, yang ada membantu terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan daerah
2. Adanya sumber Daya Manusia yang potensi untuk mengelola suatu Kabupaten tersebut
3. Adanya dukungan dari pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Riau dengan surat keputusannya nomor, 05 KPTS/PimDPRD/2000 tentang Rekomendasi Usul Penetapan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dipropinsi Riau, yang ditandatangani oleh ketua DPRD Propinnsi Daerah Tingkat I Riau,
4. Adanya dukungan dari masyarakat berupa penyataan yang dibacakan oleh beberapa perwakilan Eks Kewedanaan Tebing Tinggi , yang pada perinsipnya mendukung sepenuhnya pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Penyataan masyarakat tersebut dating dari:
 - perwakilan kecamatan Merbau
 - perwakilan kecamatan Tebing Tingi

perwakilan Kecamatan rangsang
perwakilan Kecamatan rangsang Barat
Perwakilan Kecamatan Tebing Tinggi barat

5. Dukungan Dari Kabupaten Induk yakni Kabupaten Bengkalis, teruan dalam Surat Bupati Kdh II Bengkalis,
6. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah II Bengkalis mendukung sepenuhnya Pembentukan bekas Kewdanan TebingTinggi Menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II.

b. Kendala dalam perjuangan

1. Masa Orde Lama

Pada masa Orde lama dimana pada waktu itu kondisi negara dalam keadaan yang belum stabil terhadap berbagai perubahan- perubahan, baik berupa peraturan perundang- undangan maupun kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan negara masih baru merdeka sehingga masih banyaknya kepentingan-kepentingan daerah yang belum dapat diperjuangkan, dan Negara pada waktu itu juga diharapkan pada kesulitan ekonomi.

2. Masa Orde Baru

Dengan sekelompok masyarakat asal Meranti yang ada di pekanbaru. Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal

tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Drs H. Syamsuar, M.Si., adalah Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti pasca pemekaran yang dilantik pada hari Selasa, 26 Mei 2009, oleh Mendagri Mardiyanto di Jakarta.^[3] Selanjutnya berdasarkan hasil Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2010 terpilih pasangan Drs. Irwan Nasir, M.Si., dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si., sebagai bupati dan wakil bupati terpilih sekaligus Bupati dan Wakil Bupati Pertama di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian dilantik pada hari Jum'at, 30 Juli 2010 oleh Gubernur Riau, H. Rusli Zainal atas nama Mendagri Gamawan Fauzi SH.MM di Selatpanjang. Sebagai pemimpin baru kabupaten Kepulauan Meranti periode 2010-2015 dengan meraih 28.086 suara atau 32,96 persen dari suara sah dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti yang diikuti 5 pasangan calon Bupati Wakil Bupati.

3. 4. Untuk mengetahui Hasil Perjuangan

Akhirnya hasil kerja keras bersama tercapai sudah, hal ini ditandai dengan diketuknya palu persidangan oleh ketua DPR-RI dan disetujuinya pemekaran wilayah sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah tingkat II tersendiri bersama datu II lainnya di Indonesia pada tanggal 19 desember 2008 di Jakarta Bersukur kehadiran Allah SWT atas kehendaknya, dan dilantik pula Samsuar Msc sebagai pejabat sementara Bupati sementara dan dilantik pada tanggal 26 Mei 2009 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh tokoh Masyarakat Tebing Tinggi Merbau Alai serta beberapa orang tua yang bergabung dalam Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dipimpin oleh Prof DR.H.Yohanas Oemar M.M, yang dapat menghadiri acara pelantikan Pjs.Bupati Tersebut pada tanggal 26 Mei 2009 telah pula dilantik Sekretaris Daerah Definitif Pertama untuk Kabupaten Kepulauan Meranti Semaun Rosfian oleh Gubernur Riau di Pekanbaru

Dengan diangkatnya status Tebing Tinggi dari Kecamatan menjadi Kabupaten serta ditunjang dari segi geografisnya maka Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki prospek cerah dengan hasil minyak Bumi, pertanian dan perkebunan yang melimpah dan merupakan andalan perekonomian masyarakat tebing tinggi dapat memenuhi perekonomian masyarakat kabupaten kepulauan meranti.

3.5. Pembagian Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti

Secara administratif kabupaten kepulauan meranti pada awal berdirinya terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Merbau. Dengan adanya pemekaran Kecamatan maka Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 7 kecamatan yaitu Tebing Tinggi Timur, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tebing Tinggi sebelum menjadi kabupaten merupakan daerah eks Kewedanaan Tebing Tinggi yang berada di bawah Kabupaten Benkalis, kemudian melalui usaha-usaha yang dilakukan pihak masyarakat dan pemerintahan akhirnya pada tanggal 26 Mei 2009 Tebing Tinggi menjadi Kabupaten, Terpisah dari Kabupaten Benkalis.
2. Keinginan untuk membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti telah ada semenjak tahun 1957 dimana sebagian masyarakat Tebing Tinggi menjadi Kabupaten tersendiri. Keinginan tersebut baru terwujud pada era reformasi dengan dibentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Meranti. Panitia ini bertugas melakukan musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Eks Kewedanaan Tebing Tinggi dan memutuskan pembentukan Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BPRKM). Badan Perjuangan ini bertugas mengkoordinir langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mengujud terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil Perjuangan BP2KM mulai menunjukkan keberhasilan dan dengan keluarnya Undang-Undang No 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. dengan ditingkatkannya Tebing Tinggi menjadi kabupaten merupakan wujud nyata kepedulian dan kejelian pemerintah yang pada hakikatnya berupaya untuk mengangkat pertumbuhan desa-desa sekitarnya sekaligus mengangkat kehidupan perekonomian masyarakat dalam rangka ikut mendukung program pembangunan.
4. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat dukungan dari:
 - a. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
 - b. Dari masyarakat berupa pernyataan yang dibacakan oleh beberapa perwakilan Eks Kewedanaan Tebing Tinggi.
 - c. Kabupaten Induk yakni Kabupaten Benkalis.
 - d. DPRD Kabupaten Dati II Benkalis
5. setelah Tebing Tinggi menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II, hal ini telah ditindak lanjuti pula dengan dilakukannya Pelatihan pejabat sementara (pJs) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Samsuar Msc pada tanggal 26 Mei 2009 di Jakarta Semahuan Rosfian sebagai sekda.

Berikut beberapa saran dari penulis yaitu 1) Kabupaten Kepulauan Meranti harus mampu mengali sumber-sumber penggalan daerah mampu meningkatkan pendapatan untuk pembangunan daerah maupun pembangunan masyarakat. 2) Masyarakat harus mampu menunjang usaha-usaha pemerintah sehingga kemandirian Kabupaten Kepulauan Meranti dapat benar-benar terwujud. 3) Dengan peningkatan

Eks kewedanaan Tebing Tinggi menjadi kabupaten di harapkan pemerintah dan masyarakat lebih berupaya menjadikan daerah tersebut lebih berkembang lagi karena daerah ini memiliki prospek yang luar biasa untuk masyarakat yang akan datang. 4) Kabupaten Kepulauan Meranti dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat agar dapat mengejar keinginan daerah lainnya. 5) Dengan berubahnya Tebing Tinggi menjadi Kabupaten diharapkan kepada masyarakat jangan meniru budaya yang datang dari luar yang tidak bermanfaat dan dapat berdampak negatif bagi masyarakat, namun lebih memelihara dan melestarikan budaya lama yang telah ada untuk di tingkatkan kearah yang lebih baik. 6) Diharapkan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih banyak lagi menciptakan buku –buku yang berkaitan dengan daerah Tebing Tinggi agar masyarakat luas dapat mengetahui tentang keadaan perkembangan kota Tebing Tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. 7) Kepada pemerintah daerah diharapkan betul-betul memperhatikan paea generasi muda , terutama dalam hal pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada pemuda /Tebing Tinggi yang berprestasi kelancaran dan melahirkan sumber daya manusia yang berpotensi dan siap pakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs.Eddy. Akhmad.RM dkk, Menyinkap Otonomi Daerah Membangun Riau ke Depan,Yayasan Riau ke Depan.Pekanbaru.2002.
- Dr.Ir.M.Ikhsan.Msc Dkk,2006. Pemekaran (Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Siak,Nukilan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Siak,1999.
- Muchtar Lutfi,dkk,Sejarah Riau,Team Penyusun dan Penulis Sejarah Riau Pekanbaru,1977. Kepulauan Meranti tanggal 25 Oktober 2009 di Pekanbaru.
- Norman Dewi,dkk,Selintas Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura dan Peninggalannya, Depdikbud Provinsi Riau,1999.
- Muhammad Nazir, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1989.
- Wawancara dengan Bapak DR. Ir. Agusnimar MSc selaku anggota pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 21 mei 2009 di pekanbaru.
- Wawancara dengan Bapak Fauzan Surahman S.si tanggal 20 mei 2009 di Pekanbaru.
- Wawancara dengan Bapak Herry.SE tanggal 26 oktober 2009 di Pekanbaru.
- Wawancara dengan Bapak Drs.Hainim kadir Sebagai Anggota Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 28 oktober 2009 di Pekanbaru.
- Wawancara dengan Bapak Zulkharil. S.AG Selaku Anggota Pembentukan Kabupaten